

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Desiminasi Islam Moderat

a. Pengertian Desiminasi

Diseminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Dissemination*, secara terminologi mengandung arti suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut untuk disebarkan.¹⁴ Sedangkan *Desiminasi* menurut dalam KBBI ialah Penyemaian benih atau penyebaran ide gagasan¹⁵, artinya melalui karakteristik pendidikan pesantren yang moderat dan menguatkan substansi ajaran, Islam sebagai basis pemikiran keagamaan dapat diterima diberbagai lapisan masyarakat.

Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Diseminasi ialah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara tentang inovasi tersebut.

¹⁴ Lantowa Jafar, 2017, *Semiotika : teori, metode, dan penerapannya dalam penelitian sastra / Jafar Lantowa, Nila Mega Marahayu, Muh. Khairussibyan.*

¹⁵ Kamus KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia)

b. Pengertian Islam Moderat

Kata moderat berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Moderat bisa diartikan adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. 4) pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan; 5) penggunaan ijtihad (kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al Qur'an dan Hadist). Lima karakteristik bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi harmoni dan kerjasama antar kelompok agama.¹⁶

Dalam Islam, rujukan beragama memang satu, yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, namun fenomena menunjukkan bahwa wajah Islam terpecah menjadi banyak. Ada berbagai golongan Islam yang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam praktek dan amaliahnya. Perbedaan semacam ini ternyata sudah menjadi sunnatullah, Quraish Shihab mencatat, bahwa: “keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah. Maka diartikan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran,

¹⁶ Masdar Hilmy, 2013, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU”, dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 07, Number 01, June (Surabaya: the Institute for the Study of Religion and Society (LSAS) and the Postgraduate Program (PP), IAIN Sunan Ampel), hlm. 28

baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷ Islam yang moderat itu adalah yang natural, ilmiah, dan siap untuk diaplikasikan dalam pergulatan hidup dan tentunya belum dimasuki interest-interest non agama.¹⁸

Hashim Kamali, menegaskan bahwa pengertian moderat, tidak dapat dilepaskan dari dua kata kunci kata yang lain, yakni berimbang (*balance*), dan adil (*justice*). Moderat bukan berarti kita kompromi dengan prinsip-prinsip pokok (*ushuliyah*) ajaran agama yang diyakini demi bersikap toleran kepada umat agama lain, akan moderat berarti “... *confidence, right balancing, and justice...*”¹⁹ Tanpa keseimbangan dan keadilan seruan moderasi beragama akan menjadi sia-sia. Dengan demikian, moderat berarti masing-masing tidak boleh ekstrem di masing-masing sisi pandangannya. Keduanya harus mendekat dan mencari titik temu.

Azyumardi Azra juga kerap menyebut bahwa Islam moderat merupakan karakter asli dari keberagaman Muslim di Nusantara²⁰. NU dan Muhammadiyah juga telah banyak berperan sebagai penjaga moderasi Islam sekaligus ikon Islam Nusantara. Keduanya merupakan kelompok mainstream Islam yang selalu menyerukan nilai-nilai keramahan, kedamaian, dan persatuan di tengah perbedaan yang ada, dimana faham ini yaitu wajah keislaman yang mengajarkan untuk selalu

¹⁷ Departemen Agama RI, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 36.

¹⁸ M. Zaidi Abdad, 2011, “*Pemikiran Fiqih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fiqih Formalis*” dalam *Islamica*, Vol. 6, No. 1 September, hlm. 106.

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, 2015, *The Middle Path of Moderation in Islam* (Oxford University Press), hlm.14

²⁰ M. Hilaly Basya, “*Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia*”, <http://www.madina-sk.com/index.php?option=com>, diakses tanggal 13 Oktober 2020

menjaga perdamaian melalui toleransi dan moderasi.

Term *moderat* adalah sebuah penekanan bahwa Islam sangat membenci kekerasan, karena berdasarkan catatan sejarah, tindakan kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Padahal, Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh masyarakat dunia). Berpaham Islam moderat sebagaimana disebutkan, sebenarnya tidaklah sulit mencari rujukan sebagai sejarah perkembangan Islam, baik di wilayah asal Islam itu sendiri maupun di wilayah Indonesia. Lebih tepatnya, Islam moderat dapat merujuk, jika di wilayah tempat turunnya Islam, kepada praktek Islam yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya *Khulafa al-Rashidin*, sedangkan dalam konteks Indonesia dapat merujuk kepada para penyebar Islam yang terkenal dengan sebutan Walisongo.

Kriteria dasar tersebut sebenarnya bisa juga dipergunakan untuk mensifati muslim moderat di negara-negara minoritas muslim, walaupun secara implementatif tetap ada perbedaan, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Di negara-negara minoritas muslim seperti Amerika, John Esposito dan Karen Armstrong, seperti dituturkan oleh Muqtadir Khan, mendeskripsikan muslim moderat sebagai orang yang mengeskpresikan Islam secara ramah dan bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain serta nyaman dengan demokrasi dan pemisahan politik dan agama²¹.

Termasuk dalam hal ini perbedaan dan keanekaragaman

²¹ Masykuri Abdillah, *Meneguhkan Moderasi Beragama*, dalam <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325>

pendapat dalam bidang ilmiah, bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, penafsiran kandungannya, serta bentuk pengamalannya”²² Sejak awal masuknya Islam di Indonesia ialah, Islam yang bercirikan moderat dan ramah kepada siapa pun dengan landasan filosofis dan ideologis, yaitu salah satu tipologi Islam yang lahir sebagai penengah, serta penjaga keseimbangan dari kecenderungan-kecenderungan Islam liberal maupun radikal. Di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menjadi simbol nyata dari Islam yang ramah, toleran, inklusif, konstruktif, dan moderat. Toleransi dan moderasi adalah ciri utama dari kedua ormas terbesar di Indonesia tersebut. Indonesia dikenal sebagai negerinya kaum Muslim moderat. Statement ini pernah dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid untuk menilai betapa lenturkan ekspresi keislaman orang Indonesia²³.

Para Walisongo nampaknya sadar, bagaimana seharusnya Islam dibumikan di Indonesia. Mereka paham betul bahwa Islam harus dikontekstualisasikan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajaran, sesuai dengan kondisi budaya atau bumi tempat Islam disebarkan. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep “pribumisasi Islam”. Gagasan ini dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai sumber yang normatif dan praktek keagamaan menjadi sesuatu yang kontekstual. dimana Islam dengan lentur mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda dari sudut dunia yang

²² M. Quraish Shihab, (2007), *Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, hlm. 52.

²³ Penilaian ini diberikan Abdurrahman Wahid, ketika melihat perkembangan Islam Indonesia. Baca Abdurrahman Wahid, 2006, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute,) hlm. 60.

satu ke sudut yang lain. Kemampuan beradaptasi secara kritis inilah yang sesungguhnya akan menjadikan Islam dapat benar-benar “*shalih li kulli zaman wa makan*”²⁴

Ternyata sikap toleran inilah yang banyak menarik simpatik masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Islam. Sementara itu, Walisongo adalah arsitek yang handal dalam pembumian Islam di Indonesia. Menurut catatan Abdurrahman Mas’ud,²⁵ Walisongo merupakan agen-agen penyebar islam di Jawa pada abad XV-XVI yang mampu memadukan aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam. Posisi mereka dalam kehidupan sosiokultural dan religius di Jawa begitu memikat sehingga bisa dikatakan Islam tidak pernah menjadi the religion of Java jika sufisme pola dakwah yang dikembangkan oleh Walisongo tidak mengakar dalam masyarakat. Rujukan ciri-ciri ini menunjukkan ajaran Islam yang diperkenalkan Walisongo di Tanah Jawa hadir dengan penuh kedamaian, walaupun terkesan lamban tetapi meyakinkan. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara. yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di

²⁴ M. Imdadun Rahmat, (2003).“*Islam Pribumi, Islam Indonesia*”, dalam M. Imdadun Rahmat (et al.), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, hlm. xx-xxi

²⁵ Abdurrahman Mas’ud, (2006), *Dari Haramain ke Nusantara : Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana, hlm. 54-58.

atas prinsip-prinsip Islam²⁶.

c. Konsep Islam Moderat

Konsep *wasathiyyah* dalam beberapa literatur keislaman ditafsirkan secara beragam oleh para ahli. Menurut al-Salabi kata *wasathiyyah* memiliki banyak arti. Pertama, dari akar kata *wasath*, berupa dharaf, yang berarti baina (antara). Kedua, dari akar kata *wasatha*, yang mengandung banyak arti, diantaranya: (1) berupa isim (kata benda) yang mengandung pengertian antara dua ujung; (2) berupa sifat yang bermakna (*khiyar*) terpilih, terutama, terbaik; (3) *wasath* yang bermakna al-'adl atau adil; (4) *wasath* juga bisa bermakna sesuatu yang berada di antara yang baik (*jayyid*) dan yang buruk (*radi'*).²⁷

Moderasi Islam seharusnya dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini merupakan keniscayaan yang menghindarkan kita dari tindakan-tindakan ekstrem yang berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstremkanan disatu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri disisi lain. Kemoderatan Islam tersebut

²⁶ Abdurrahman Mas'ud, (2006), *Dari Haramain ke Nusantara : Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana, hlm. 67.

²⁷ Ali Muhammad Muhammad al-Salabi, 2001, *al-Wasathiyyah fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Maktabahat-Tabi'in), hlm. 13-14

kemudian terekam juga dalam berbagai disiplin ilmu, mulai akidah, fiqih, tafsir, pemikiran, tasawuf dan dakwah.

Sama dengan pemaknaan *al-Sallabi*, Kamali menganalisis wasathiyah sinonim dengan kata tawassuṭ, I'tidal, tawazun, iqtisad. Istilah moderasi ini terkait erat dengan keadilan, dan ini berarti memilih posisi tengah di antara ekstremitas. Kebalikan dari *wasathiyah* adalah *tatarruf*, yang menunjukkan makna “kecenderungan ke arah pinggiran” “*ekstremisme*,” “adikalisme,” dan “berlebihan”. Sedangkan Qardhawi mengidentifikasi wasathiyah ke dalam beberapa makna yang lebih luas, seperti adil, istiqamah, terpilih dan terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan.²⁸

Jadi secara tidak langsung Konsep Islam Moderat (*moderasi islam*) digagas tidak lain dalam rangka untuk membendung paham radikalisme yang mengancam peradaban dan perdamaian dunia. Walaupun istilah radikalisme diproduksi oleh Barat, namun gejala-gejala dan perilaku kekerasan itu dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah umat Islam. Fenomena radikalisme dan dalam Islam sebenarnya dapat diyakini sebagai produk atau ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, sebagai hasil dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan kolonialisme dan imperialisme ke dunia Islam. Terpecahnya dunia Islam ke dalam berbagai Negara bangsa, pemerintahan baru berhaluan Barat,

²⁸ Yusuf Qardhawi, 2011, *al-Kalimat fi al-Wasathiyah al-Islamiyah wa Ma'alimaha* (Cairo: Dar al-Shuruq)

dan terjadinya pobia Islam mengakibatkan umat Islam merasakan terkikisnya ikatan agama dan moral yang selama ini dipegang teguh²⁹

Istilah *radikalisme* berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris, kata *radical* berarti ekstrim, revolusioner, menyeluruh, fanatik, sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau ekstrim. Pengertian paham radikalisme keagamaan memang tidak selalu identik dengan aksi-aksi kekerasan karena dalam kenyataannya, ada banyak kelompok yang dianggap radikal, namun mereka hanya radikal sebatas ideologi dan pemikiran, namun mereka tidak menggunakan cara-cara yang ekstrim dan vandalis. Namun, ada juga kelompok yang memang menghalalkan segala cara ekstrim dalam memperjuangkan faham keagamaannya. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah radikalisme merujuk pada sikap atau ketidakpuasan seseorang atau kelompok terhadap status quo dan tuntutan perubahan yang mendasar terhadap sesuatu yang sudah mapan.³⁰

Hal ini merupakan fakta sejarah yang tidak mudah terbantahkan. Walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa. Namun, gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru dimulai setelah ditandai dengan munculnya sebuah gerakan teologis yang radikal, banyak yang menyebut mereka dengan

²⁹ Penjelasan yang komprehensif mengenai basis sosial psikologis revivalisme Islam di Timur Tengah, dapat dilihat dalam R. Hrair Dikmejian, 1985, *Islam in Revolution: Fundamentalism in Arab World* (New York: Syracuse University Press), hlm. 25- 36.2

³⁰ M. Nuh, Nuhriison. (2009). *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia*. *HARMONI: JURNAL MULTIKULTURAL & multireligius* vol. viii, nomor 30, april-Juni 2009, 35-47.

“Khawarij”. yaitu golongan orang Islam yang keluar dari kesatuan umat Islam, golongan “Khawarij” memandang dirinya sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halaman untuk “berhijrah” dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya³¹.

Sejarah kekerasan dan radikalisme sering kali membawa isu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang sangat kuat, melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Karena agama diangkat sampai pada bidang teologis dan mempengaruhi tingkat supranatural. Dengan atas nama agama, kemudian radikalisme diabsahkan dengan berbagai tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham (*takfiriyyah*) sampai melakukan pembunuhan terhadap kawan yang tidak seideologinya.

Di zaman pasca Orde Baru, di mana kran demokrasi terbuka dengan bebas, ormas-ormas yang sering dicap radikal, turut mengambil bagian dalam dinamika demokrasi Indonesia. Umumnya mereka tidak mendirikan partai politik, namun tetap menjalin kerjasama dengan kader partai khususnya partai yang bercorak islamis yang memiliki kecenderungan terhadap pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI). Namun, ada juga yang menolak memperjuangkan aspirasinya melalui jalur demokrasi (politik kepartaian) dan memilih golput dalam setiap pemilu karena hal tersebut dianggap sebagai produk. Demokrasi kufur yang tak bisa disandingkan

³¹ Achmad Gholib, 2005, *Teologi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press), hlm. 47.

dengan hukum Tuhan yang telah lengkap dan sempurna, sebagaimana yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir (HT). Sebagai alternatif, HT bersama para proponennya menawarkan sistem khilafah islamiyah yang sifatnya transnasional. Bagi HT, sistem khilafah islamiyah merupakan sistem yang paling cocok diterapkan di seluruh penjuru dunia karena sistem ini berasal dari Tuhan, sehingga kebenarannya tak perlu lagi diragukan.

Berbeda dengan MMI dan HTI lahir segera setelah peristiwa reformasi, FPI adalah kelompok Muslim radikal³² yang lahir sebelum itu, tepatnya menjelang runtuhnya Orba. Peranan FPI sampai sekarang cukup signifikan, terutama pada lanskap politik Indonesia, sebagai organisasi keislaman yang sangat aktif dan punya pengaruh yang cukup besar dibanding kelompok Islam lainnya. Secara kultur dan ideologi, pada dasarnya, FPI sama halnya seperti organisasi NU yang menganut ideologi *Ahl al Sunnah wa alJama'ah* (Aswaja). Namun, bagi FPI, mengikuti jejak kaum salaf shalih (*Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*) harus dilakukan secara total tanpa *reserve*³³. Dengan berpijak pada pemahaman keagamaan yang demikian, khususnya pada jargon “amar makruf nahi mungkar”, maka tidak heran jika organisasi ini seringkali melakukan aksi premanisme (*vigilante*) terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggap sebagai pelaku dosa (*sinner*), dan berusaha ingin

³² Sidney Jones et al, 2015, *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia* (Jakarta: PUSAD-Paramadina)

³³ Al-Zastrouw Ng., 2006, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta:LKiS), hlm. 90-94.

melenyapkan perilaku yang dilarang agama (*deviant group*), seperti prostitusi dan jual-beli minuman keras³⁴.

Politik muslim melibatkan perlombaan dan persaingan penafsiran tentang simbol dan kontrol atas lembaga, baik formal maupun informal, yang membuat dan mempertahankan simbol-simbol lembaga tersebut. Penafsiran simbol-simbol dilakukan selalu dihadapkan dengan konteksnya.³⁵ Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai. Menurut Azyumardi Azra, radikalisme merupakan bentuk ekstrem dari revivalisme. Revivalisme merupakan intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi ke dalam (*inward oriented*), dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya diterapkan untuk diri pribadi. Adapun bentuk radikalisme yang cenderung berorientasi keluar (*outward oriented*), atau kadang dalam penerapannya cenderung menggunakan aksi kekerasan lazim disebut fundamentalisme.³⁶

Di Indonesia fenomena radikalisme semakin terlihat nyata. Dalam pengamatan Sidney Jones jumlah mereka minoritas, dan lebih sedikit dari mereka yang menggunakan kekerasan.³⁷ Greg Barton juga

³⁴ Azyumardi Azra, 2003, "Introduction: The State and Shari'ah in the Perspective of Indonesia Legal Politics", dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: ISEAS), hlm. 2.

³⁵ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, 1998, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. 6

³⁶ Azyumardi Azra, 1999, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 46-47.

³⁷ Sahri, 2016, "Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 6, no.1, hlm. 239.

menambahkan bahwa radikalisme agama terjadi lagi pada dekade 1950, hal mana ini ditandai dengan munculnya gerakan Darul Islam. Namun pada tahun 1962 gerakan DI/TII dapat dipatahkan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi gerakan ini telah terlanjur mendapat simpati dan dukungan dari sebagian kalangan umat Islam di Indonesia. Oleh karenanya, para aktivis yang tidak tertangkap menjadi embrio untuk menggerakkan lagi tradisi radikalisme di Indonesia.³⁸ Nampaknya kemunculan DI/TII tidak bisa ditutupi lagi. Setelah ada yang lolos, mereka mendirikan Darul Islam dan bersemayam di Solo yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir.³⁹

Tumbuhnya gerakan radikalisme di Indonesia tidak hanya dari dalam melainkan juga dibarengi dengan adanya infiltrasi dari luar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Barton bahwa gerakan Wahabi mulai tumbuh tidak lepas dari peran Muhammad Natsir. Melalui organisasi yang dibangun Natsir yakni Dewan Dakwah Islam Indonesia berhasil memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan di universitas Ibn Saud. Dalam perkembangannya, DDII bekerjasama dengan universitas tersebut untuk mendirikan Lembaga Pengetahuan Bahasa Arab-LPBA atau lebih dikenal LIPIA.⁴⁰ Salah satu lulusan yang terkenal dari LIPIA adalah Ja'far Umar thalib, pendiri dan pimpinan Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal-Jamaah (FKAWJ). Hemat penulis, dari fenomena Darul Islam dan LIPIA

³⁸ Zulfadli, 2017, "*Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia*", jurnal Akademika, vol. 22, no. 1, Januari, hlm. 182

³⁹ Greg Barton, 2009, "*in The Combating Terrorism at West Point Radical Islamic Ideology in Southeast Asia, Scott Helfstein*" (ed), Southeast Asia Project, hlm. 34-35.

⁴⁰ Greg Barton *in The Combating Terrorism*, hlm. 36.

menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya Islam radikal di Indonesia, baik secara struktural maupun kultural.⁴¹

Generasi pengusung Islam moderat di Indonesia berikutnya, hanya sekedar miniatur, mungkin dapat merujuk kepada praktek Islam yang dilakukan oleh organisasi besar semacam Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama). BerIslam dalam konteks Indonesia semacam ini lebih cocok dituangkankan, meminjam konsepnya Syafi'i Ma'arif, dengan ber "Islam dalam Bingkai Keindonesiaan"⁴².

Dari berbagai istilah tersebut, istilah radikalisme dipandang lebih tepat ketimbang *fundamentalisme* dan istilah-istilah lain, karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang multitafsir. Arti Fundamentalisme dalam perspektif Barat berarti paham orang-orang yang kaku dan ekstrem serta tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara, dalam pemikiran teologi keislaman, istilah *fundamentalisme* lebih mengarah pada gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku muslim untuk merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Fundamentalis juga terkadang ditujukan kepada kelompok yang berupaya mengembalikan Islam (*revivalis*)⁴³.

Dari segi pendekatan kekekuatan kultural, NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam moderat terbesar di Indonesia bahkan dunia senantiasa ikhlas dan konsisten membantu negara dalam

⁴¹ <https://media.neliti.com/media/publications/264716-radikalisme-islam-indonesia>

⁴² Ahmad Syafi'i Ma'arif, (2009), *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan

⁴³ Akbar S. Ahmed, 1993, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi (Bandung: Mizan), hlm. 171; William Montgomery Watt, 1998, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (London: T.J. Press), hlm. 2; H.A.R. Gibb, 1990, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 52.

melakukan counter terhadap Islam radikal. Dua ormas terbesar ini harus senantiasa menjadi garda terdepan dalam merawat keragaman yang ada di Indonesia melalui berbagai pendekatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Juga penting untuk dilakukan adalah para pendukung kelompok Islam moderat tidak boleh menjadi silent, majority. Mereka harus berani melawan aksi-aksi yang dapat mengancam keragaman dinegeri ini. Pada dasarnya, kelompok Islam radikal adalah *noisy minority*, namun karena terjadi pembiaran dari kelompok *silent majority* yang umumnya moderat, maka kelompok Islam radikal memanfaatkan peluang ini untuk memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat. Setiap elemen masyarakat juga perlu mewarnai ruang publik termasuk media sosial yang belakangan ini pengaruhnya sangat kuat di masyarakat dengan konten-konten yang positif agar nalar warga tetap berada di rel yang benar.

Pengarusutamaan Islam moderat jika ditarik dalam sistem manajemen pendidikan Islam ini sangat menarik dan merupakan langkah yang sangat strategis. Di samping memiliki legitimasi historis sebagai pendidikan yang indigenous Indonesia,⁴⁴ pendidikan Islam di Indonesia mulai menegaskan dirinya sebagai tipe pendidikan yang moderat.⁴⁵ Tipologi pendidikan Islam moderat ini sesuai dengan watak keislaman nusantara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

⁴⁴ Nurcholis Madjid, 1997, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret perjalanan* (Jakarta: Paramadina), hlm. 3.

⁴⁵ Ini bisa kita lihat misalnya dalam visi pendidikan Islam tahun 2015-2019 oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang berbunyi “*Terwujudnya pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi*”.

keadilan, dan nilai luhur kebudayaan. Selain itu, pendidikan Islam moderat juga berorientasi melahirkan generasi muslim yang berkarakter moderat.

d. Ciri-ciri Islam Moderat

Dalam melakukan konstruksi moderasi Islam dalam manajemen pendidikan, maka yang pertamakali diperlukan adalah rumusan Ciri-ciri dari prinsip yang akan menjadi acuannya. Prinsip ini menyediakan petunjuk bagi pelaksanaan setiap aktivitas, dan oleh karenanya prinsip memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai kerja intelektual, termasuk di dalam membuat kurikulum. Merujuk pada prinsip-prinsip yang digali dari moderasi Islam, kurikulum pendidikan Islam bisa dikembangkan dengan mengacu pada beberapa ciri-ciri prinsip sebagai berikut:

a) Prinsip Universal

Salah satu prinsip mendasar moderasi Islam adalah prinsip universal. Prinsip universal kurikulum berangkat dari argumen bahwa Tuhan mengutus utusan untuk semua bangsa dan umat, dan oleh karena itu ajarannya mencerminkan universalitas. Oleh karena itu, muatan kurikulum harus mencakup semua aspek dan berlaku menyeluruh, tanpa dibatasi oleh sekat kedaerahan dan wilayah.⁴⁶ Prinsip universalitas kurikulum juga menghendaki adanya totalitas dalam pengembangan potensi peserta didik, yang tercakup dalam

⁴⁶ Nurcholis Madjid, 2008, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. Ke-6 (Jakarta: Paramadina Bekerjasama dengan Dian Rakyat), hlm. 434

tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.⁴⁷ Pendidikan Islam di banyak tempat masih diperlakukan sebagai doktrin semata sehingga ia hanya berorientasi ke dalam. Muatan, kajian, dan produk pendidikan Islahnya untuk umat Islam (internal) dan tidak membuka peluang yang lebih longgar bagi khalayak umum (eksternal) dengan berbagai latar keagamaan yang lain, sehingga pembaca yang notabene beragama non-muslim kurang bisa menangkap pesan yang dihasilkan dari produk pendidikan Islam.

Untuk itu ketika terjadi perselisihan antar umat seagama maupun umat beragama, harus dimasukkan dalam wacana dialog peradaban, toleransi, dan kerukunan. sebenarnya ajaran yang memegang dan mau menerima hal tersebut lebih tepat disebut sebagai moderat. Jadi, ajaran yang berorientasi kepada perdamaian dan kehidupan secara harmonis dalam keberbagaian, lebih tepat disebut moderat, karena gerakan ajaran ini menekankan pada sikap menghargai dan menghormati keberadaan “yang lain” (*the other*).

b) Prinsip Keseimbangan

Salah satu ciri dari moderasi Islam yaitu memuat prinsip keseimbangan (*tawazun*). Keseimbangan ini bisa dilihat dari aspek keseimbangan antara perilaku, sikap, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip keseimbangan juga merupakan sikap dan orientasi hidup yang diajarkan Islam, sehingga peserta didik tidak terjebak pada ekstrimisme dalam hidupnya, tidak semata-mata

⁴⁷ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, 1979, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 520

mengejar kehidupan ukhrawi dengan mengabaikan kehidupan duniawi.⁴⁸ Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam harus didesain dengan menggunakan prinsip ini. Disini kurikulum moderat dikonstruksi melalui keseimbangan antara rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas.

c) Prinsip Integrasi

Prinsip integrasi ini juga merupakan salah satu ciri prinsip moderasi kurikulum yang sangat penting. Dalam pengembangan kurikulum, integrasi ini banyak dibicarakan oleh para ilmuwan muslim seperti Fazlur Rahman, Seyyed Hossein Nasr, Ismail Raji` al-Faruqi, dan Syekh Muhammad Naquib al-Attas. Di Indonesia upaya integrasi ilmu juga dikembangkan oleh ilmuwan muslim seperti Kuntowijoyo dengan konsep “Pengilmuan Islam,” dengan menjadikan al-Qur’an sebagai paradigma keilmuan, yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) integralisasi yaitu pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu; (2) objektifikasi yaitu menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang.⁴⁹

Imam Suprayogo menawarkan integrasi ini dengan mengilustrasikan sebatang pohon yang utuh, dimana kajian keagamaan harus ditopang dengan landasan keilmuan yang lain

⁴⁸ Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural...*, 70

⁴⁹ Kuntowijoyo, 2004, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: Teraju),49

agar studi-studi keislaman bisa berdiri kokoh.⁵⁰ Integrasi ini dalam pandangan Amin Abdullah perlu dipadukan dengan interkoneksi. Pendekatan integratif-interkonektif adalah penekatan yang berusaha saling menghargai; keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan manusia, hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan (*approach*) dan metode berpikir (*process and procedure*) antara kedua keilmuan tersebut.⁵¹ Prinsip integrasi yang ditawarkan para pemikir di atas setidaknya bisa menjadi modal berharga dalam menancapkan moderasi kurikulum pendidikan Islam.

d) Prinsip Keberagaman

Adapun Ciri prinsip moderasi Islam sebenarnya juga mengandung prinsip “Bhineka Tunggal Ika,” suatu prinsip kesetaraan dan keadilan di tengah perbedaan untuk mencapai persatuan. Prinsip ini dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap perbedaan-perbedaan peserta didik, baik berupa perbedaan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, agama, ras, etnik, dan perbedaan lainnya. Pemeliharaan terhadap perbedaan ini menambah kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan kebutuhan peserta

⁵⁰ Imam Suprayogo, 2005, *Paradigma Pengembangan Keilmuan pada Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi yang Dikembangkan UIN Malang* (Malang: UIN Malang Press)

⁵¹ Abdullah, Amin. 2008, “*Desain Pengembangan Akademik IAIN menuju UIN Sunan Kalijaga: dari penekatan Dikotomis-Atomistis ke arah integratif-interdisiplinary*” dalam Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 242

didik dalam konteks Negara Indonesia yang multikultur.⁵²

e) Prinsip Kebangsaan

Pendidikan pesantren berperan besar dalam pembangunan di Indonesia.⁵³ Bukan saja sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren telah teruji sebagai lembaga yang turut serta membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Dalam bahasa Clifford Geertz, pesantren adalah sub-kultur Islam yang mengakar pada kebudayaan lokal.⁵⁴ Didalamnya tidak hanya terdapat sarana dan praktek pendidikan, melainkan identik dengan sistem nilai. Nilai-nilai itu merupakan hasil dialektika dinamis antara nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada teks yang diajarkan seperti kitab kuning, dan ketokohan kyai-nya, yang berinteraksi dengan realitas sosio kultural dan politik yang tumbuh dalam kebudayaan Indonesia, serta interaksinya dengan dunia luar.

2. Manajemen Pendidikan Pesantren

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata to

⁵² Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, 1979, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 521

⁵³ Lihat Mastuhu M. Ed, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, . Usia pondok pesantren telah mencapai 300-400 tahun yang lalu, di mana untuk pertama kalinya didirikan oleh Syeikh Maulana Malik ibrahim atau Syeikh Maulana Maghribi (w. 12 Rabi'ul Awwal 822 H/8 April 1419). Beliau mendirikan pondok pesantren di Jawa .

⁵⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, (New York: 1973). Lihat juga, Clifford Geertz, "Ritual and Social Change: A Javanese Example", in *American Anthropologist*, Vol. 59, No. 1. 1957. Pesantren sebagai sub kultur dalam masyarakat karena ciri-cirinya yang uni, seperti adanya cara hidup yang dianut, pandangan dan tata nilai yang diikuti secara hirarki kekuasaan tersendiri yang ditaati sepenuhnya. Baca di Abdurrahman Wahid, "*Pesantren Sebagai Subkultur*", dalam M. Dawam Raharjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 39-60.

manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata manus, yang artinya adalah tangan.⁵⁵ Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R.Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁵⁶

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan bekerja bersama-sama orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).⁵⁷

Manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Menurut Stoner menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan

⁵⁵ Drs. H. Sadili Samsudin, M.M., M.Pd, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 15

⁵⁶ Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 3

⁵⁷ T. Hani Handoko, 2012, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 8

organisasi yang telah ditetapkan⁵⁸

Dari rangkaian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen.

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating* dan *Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain

⁵⁸ Dr.H.Abdul Choliq, M.T., M.A, 2011, *Pengantar Manajemen*, Semarang: Rafi Sarana, hlm.2-3

tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik.

a. Perencanaan

Menurut G.R. Terry, Planning atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁵⁹ Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) adalah (1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal

⁵⁹ M. Ngalim Purwanto, 2006, *Manajemen dan Organisasi Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 45

tersebut kearah tujuan, (3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.⁶⁰

c. Penggerakan

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.⁶¹

d. Pengawasan

Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-

⁶⁰ T. Hani Handoko, 2012, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 24

⁶¹ M. Ngalim Purwanto, 2006, *Manajemen dan Organisasi Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 58

penyimpangan dari rencana.⁶²

3. Dasar dan Tujuan Manajemen

Manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, madrasah dan juga lainnya.

Terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen yaitu:

- a. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi.
- b. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual.
- c. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen.
- d. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (*style*) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.⁶³

⁶² M. Manulang, 1982, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 174

⁶³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hlm. 86

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya.⁶⁴

Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan.

Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuantujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen merupakan sebuah proses kerja sama untuk mencapaitujuan bersama. Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen, ialah proses pencapaian tujuan organisasi melalui

⁶⁴ Syafaruddin, 2005, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, hlm. 41

pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Dengan demikian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen.

4. Fungsi-Fungsi Manajemen

Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan, (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.⁶⁵

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating* dan *Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen.

⁶⁵ Nanang Fattah, 2011, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke 10, hlm. 1

a. Perencanaan

Menurut G.R. Terry, Planning atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas- aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁶⁶

Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) adalah (1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, (3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan

⁶⁶ M. Ngalim Purwanto, 2006, *Manajemen dan Organisasi Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 45

struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.⁶⁷

c. Penggerakan

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.⁶⁸

d. Pengawasan

Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.⁶⁹

⁶⁷ T. Hani Handoko, 2012, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 24

⁶⁸ M. Ngalim Purwanto, 2006, *Manajemen dan Organisasi Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 58

⁶⁹ M. Manulang, 1982, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 174

5. Pengertian Pesantren

Pengertian Pesantren dalam terminologi pendidikan Islam yaitu lembaga pendidikan islam yang mengajarkan pendidikan islam secara mendalam, yang dalamnya terdapat pondok, masjid, pengajaran kitab Islam klasik, santri dan kyai.⁷⁰ Abdurrahman Wahid mendefinisikan pengertian pesantren sebagai tempat dimana santri hidup. Mashutu memberi batasan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.⁷¹

Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul Tradisi Pondok pesantren mendefinisikan pengertian pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.⁷²

Sedangkan menurut Muhammad Idris Jauhari dalam bukunya yang berjudul “*Hakekat Pesantren Dan Kunci Sukses Belajar Di Dalamnya*”. Pondok berarti tempat tinggal dan pesantren berasal dari kata penyantrian yang memiliki dua arti, yaitu : tempat santri atau proses menjadi santri.⁷³

⁷⁰ Zamakhsyari Dhofier, 2011, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia – Edisi Revisi* (Jakarta: LP3ES), hlm. 79-93.

⁷¹ Zainal Abidin, 2011, *Dari Pesantren Untuk Umat*, (Surabaya: IMTIYAZ) hlm. 9

⁷² Zamakhsyari Dhofier, 1982, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Kyai*, (Jakarta: LP3ES) hlm. 43

⁷³ Muhammad Idris Jauhari, *Hakekat Pesantren Dan Kunci Sukses Di Dalamnya* (Preduan : Al Amien Printing) hlm. 2

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan mempelajari ajaran Islam secara kuat serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Atau dapat diambil pengertian pesantren sebagai tempat dimana para santri belajar pada seorang kyai untuk memperoleh ilmu agama yang diharapkan menjadikan bekal bagi santri dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat.

Sedangkan menurut Muhammad Idris Jauhari dalam bukunya yang berjudul “*Hakekat Pesantren Dan Kunci Sukses Belajar Didalamnya*”. Pondok berarti tempat tinggal dan pesantren berasal dari kata penyantrian yang memiliki dua arti, yaitu: tempat santri atau proses menjadi santri.⁷⁴ Pesantren adalah bentuk pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad. Nurcholis Madjid menyebutkan, bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia.⁷⁵ Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan yang disebut sebagai pusat penyiaran Islam tertua lahir dan berkembang spada saat masuknya Islam di Indonesia. Pada awal berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat sederhana. Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di langgar (musolla) atau masjid oleh seorang kyai dan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan “pengajian” ini berkembang seiring

⁷⁴ Muhammad Idris Jauhari, *Hakekat Pesantren Dan Kunci Sukses Di Dalamnya* (Preduan : Al Amien Printing) hlm. 2

⁷⁵ Nurcholis Madjid, 1997, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta:Paramadina,), hlm.107

dengan penambahan jumlah santri dan pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut pesantren.⁷⁶

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan tema pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman. Dalam perkembangannya, pondok pesantren mengalami perubahan pesat, bahkan ada kecenderungan menunjukkan trend, di sebagian pesantren telah mengembangkan kelembagaannya dengan membuka sistem madrasah, sekola umum, dan diantaranya ada yang membuka semacam lembaga pendidikan kejuruan seperti bidang pertanian, peternakan, teknik dan sebagainya.

6. Pengertian Manajemen Pendidikan Pesantren

Dalam menjawab dan mentransformasi peran pesantren secara lebih luas, maka diperlukan sistem manajemen tatakelola pendidikan pesantren, baik dibidang pendidik dan tenaga kependidikan, maupun dibidang kurikulum yang mampu menjawab perubahan zaman hari ini, dimana semua ini sarat dengan berbagai persoalan, diantaranya persoalan kualifikasi, pembinaan dan pengembangan keprofesionalan, serta kinerjanya sangat membutuhkan perhatian, arahan dan bimbingan yang intensif dan berkelanjutan sehingga betul-betul mampu menjalankan segenap tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, selaras dengan tuntutan standar pendidik dan tenaga pendidikan yang distandarisasikan⁷⁷

Di era 1970-an, pesantren sudah mampu bergumul dengan

⁷⁶ Husni Rahim, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos,), hlm. 157

⁷⁷ Diding Nurdin, "Manajemen Pendidikan" ..., hlm. 239.

pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Di antara persoalan penting yang dihadapi oleh pesantren kala itu yaitu menyangkut konsep politik, di bidang pemerintahan dan kenegaraan, terutama kaitannya dengan “Konsep Negara Islam”. Pesantren mengalami benturan antara konsep negara Islam dan negara Pancasila. Tapi di balik itu, telah muncul pemikiran untuk mendamaikan keduanya, yaitu antara keislaman dan kebangsaan (*nation state*)⁷⁸

Kalau dahulu Pesantren identik tempat pembelajaran ilmu agama baik itu tauhid, akhlak, tasawuf, fikih, bahasa arab dan lain-lain, pesantren-pesantren di Indonesia saat ini umumnya secara afiliasi sudah sangat heterogen dengan berbagai tipologinya⁷⁹.

Transformasi ini mampu di implementasikan di bidang metodologi dan bahkan epistemologi seiring dengan tuntutan zaman, dan hampir diikuti semua pesantren salaf dengan basis ilmu keagamaan saja.

Kemudian bertransformasi dengan mengajarkan juga kurikulum pendidikan umum. Pola pesantren ini kemudian menjadi lumrah di Indonesia dan diikuti oleh para lembaga pendidikan Islam lainnya untuk ikut mendirikan lembaga pendidikan terpadu yang identik dengan ciri khas pesantren, walaupun terkadang para pegiat ini banyak yang mendapat donasi dari luar kelembagaan untuk pendirian pesantrennya sebelum matang dalam keilmuan syariat dan bahkan menanggalkan ilmu tasawuf sebagai background budaya dan karakter akhlak para kyai

⁷⁸ M. Dawam Rahardjo, 1993, *Intelektual, Inteligensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan), hlm. 273-291.

⁷⁹ M. Makinuddin, 2017, “Bahasa Arab Sebagai Kekhasan Pesantren dan Tantangannya Dalam Situasi Global” *Jalie: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, vol. 1, no. 2, p. 289.

sebagai mandataris otoritas tertinggi, sehingga tak jarang para alumni dan santri pesantren model demikian kurang memahami arti toleransi, heterogenitas dan pluralitas yang ada di masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia pada umumnya.

Pesantren yang dalam pendidikan kurikulumnya tetap mempertahankan keilmuan *tasawuf* biasanya berafiliasi dengan Ormas NU yang saat ini jumlah pesantrennya menjadi mayoritas dan masih mendominasi di berbagai daerah. Beberapa Pesantren yang tidak mengajarkan ilmu tasawuf dalam kurikulumnya, biasanya pesantren yang berafiliasi dengan ulama Kerajaan Saudi Arabia, dalam penjelasannya Ridwan Nasir mengelompokkan pesantren menjadi lima, yaitu;

- a. Pesantren salaf, pesantren yang terdapat sistem sorogan dan sistem klasikal;
- b. Pesantren semi berkembang, pesantren yang terdapat sistem pendidikan salaf dan sistem madrasah swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum;
- c. Pesantren berkembang, pesantren yang mirip pesantren semi berkembang, namun komposisi kurikulumnya lebih variatif, yaitu 70% agama dan 30% umum;
- d. Pesantren modern, seperti pesantren berkembang, namun sudah lebih lengkap, ada strata pendidikan yang sampai perguruan tinggi, dan dilengkapi takhaşşuş bahasa Arab dan Inggris; dan
- e. Pesantren ideal, sebagaimana pesantren modern, dengan strata pendidikan yang ada lebih lengkap dengan adanya bidang

keterampilan yang meliputi; teknik, perikanan, pertanian, perbankan dst. yang benar-benar memperhatikan kualitas dengan tidak menghapus ciri khas pesantren.

Sebagaimana dikatakan oleh Mastuhu; dewasa ini hampir setiap pesantren terdapat jenis-jenis pendidikan: (1) pesantren, yang hanya mempelajari agama dengan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning dan berbentuk non formal, (2) madrasah (sekolah agama), (3) sekolah umum, dan beberapa di antaranya (4) perguruan tinggi, baik agama maupun umum.⁸⁰

Sebuah fakta modernisasi untuk melahirkan generasi muslim moderat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemandirian dan moderasi yang diajarkan dipesantren dan ditekankan kepada para santri merupakan modal utama dalam mengantarkan para santri dan masyarakat sekitar menuju pembentukan masyarakat yang produktif (masyarakat/muslim moderat)⁸¹, keberadaan Islam Indonesia yang lebih dikenal dengan islam moderat, damai, dan toleran merupakan realitas empiris-historis tak terbantahkan⁸², didalamnya terdapat peran nyata dari pesantren.

Maka oleh karena itu pesantren harus mengembangkan sistem manajemen yang bagus dalam rangka menjaga kualitas dan menaikkan nilai esensial dari pesantren, ini sangat penting Karena

⁸⁰ Mujamil Qomar, 2006, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga,) 101.

⁸¹ Abd. A'la, 2006, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,) 49.

⁸² Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik...*, 85

secara tidak langsung pesantren sebagai basis tempat desiminasi faham islam yang moderat, mengedepankan kesantunan dan nilai-nilai tengah, sehingga islam tersebar dapat memberi rahmat bagi semua umat manusia

b. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Pendidikan Pesantren

Karakteristik atau prinsip-prinsip umum pondok pesantren adalah sebagai berikut:

a. Adanya Pondok atau Asrama

Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya (santri) tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan Kyai. Dengan istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan ke-Islaman yang melembaga di Indonesia. Pondok atau asrama merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri. Adanya pondok ini banyak menunjang segala kegiatan yang ada. Hal ini didasarkan jarak pondok dengan sarana pondok yang lain biasanya berdekatan sehingga memudahkan untuk komunikasi antara Kyai dan santri, dan antara satu santri dengan santri yang lain.⁸³

b. Adanya Masjid atau Mushola

Kedudukan masjid atau mushola sebagai sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengankata lain

⁸³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 82.

kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak masjid Quba' didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam.⁸⁴

c. Adanya Santri

Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Dalam tradisi pesantren, santri terbagi menjadi dua ; pertama, santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Kedua, santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren, mereka bolak balik dari rumahnya sendiri.⁸⁵

d. Pengajaran Kitab-kitab Klasik

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap faham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan faham pesantren yang tidak dapat dipisahkan. Ciri-ciri khusus pendidikan pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi arab, hukum islam, tafsir Hadis, tafsir Al-qur'an dan lain-lain.⁸⁶

e. Adanya Kiai

⁸⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 85.

⁸⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 89

⁸⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 86

Istilah Kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Kata Kyai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Selain gelar Kyai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati di Jawa. Gelar Kyai juga diberikan untuk benda-benda yang keramat dan dituahkan, seperti keris dan tombak. Namun demikian pengertian paling luas di Indonesia, sebutan Kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk Allah SWT serta menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui pendidikan.⁸⁷

Menurut Mastuhu, ada beberapa prinsip pada pendidikan pesantren, yang prinsip-prinsip tersebut dapat digambarkan sebagai ciri utama tujuan pendidikan pesantren, antara lain:

- 1) Memiliki kebijaksanaan dalam ajaran Islam, anak didik dibantu supaya mampu memahami makna hidup, keberadaan, peranannya, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan di masyarakat.
- 2) Memiliki kebebasan yang terpimpin, kebebasan yang terpimpin seperti dalam ajaran Islam mempunyai bahwa manusia bebas menetapkan aturan hidup tetapi dalam berbagai hal manusia harus menerima apa saja aturan yang datang dari Tuhan.
- 3) Berkemampuan mengatur diri sendiri, bahwa masing-masing pesantren mampu mengatur dirinya sendiri, baik dalam mengatur kegiatan santrinya maupun dalam mengatur kurikulumnya sendiri.

⁸⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 93

- 4) Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, dalam pesantren berlaku prinsip bahwa dalam hal kewajiban, individu harus menunaikan kewajiban lebih dahulu. Sedangkan dalam hal hak, individu harus mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingannya sendiri. berbagai pranata di Pesantren, seperti tidak membantah guru, mengedepankan kesantunan dan lain-lain.
- 5) Cinta kepada ilmu, orang-orang pesantren cenderung memandang ilmu sebagai sesuatu yang suci dan punya derajat yang tinggi.
- 6) Mandiri, adanya metode sorogan yang individual memberikan pendidikan kemandirian, dengan metode ini santri berani maju diuji sesuai dengan kecerdasan dan keuletannya sendiri.
- 7) Kesederhanaan, dalam pesantren sikap kesederhanaan yaitu sikap memandang sesuatu terutama materi untuk digunakan secara wajar, proporsional dan fungsional. Kesederhanaan ini sesungguhnya merupakan realisasi ajaran Islam yang umumnya diajarkan oleh para sufi.⁸⁸

c. Tujuan Pendidikan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memperdalam ilmu agama (*tafaqqah fiddin*) dan membentuk moralitas umat melalui belajar agama dan mencetak pribadi Muslim yang kaffah, dapat melaksanakan ajaran Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah

⁸⁸ Ahmad Tafsir, 1992, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 201-202

⁸⁹ Zainal Abidin..., hlm. 12

suatu lembaga pendidikan non formal yang didirikan oleh seorang Kyai sebagai figur sentral yang dominan menetapkan tujuan pendidikan pondoknya. Tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi pelayan atau abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin di tuju ialah kepribadian yang muhsin, bukan sekedar muslim.

Menurut M. Arifin bahwa tujuan didirikannya pendidikan pesantren pada dasarnya terbagi pada dua yaitu:

a. Tujuan Khusus

Yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh para Kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.

b. Tujuan Umum

Yakni membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu dan amalnya.

Pada masa kolonialisme, pesantren merupakan lembaga pendidikan agama yang sangat berjasa bagi masyarakat dalam mencerahkan dunia pendidikan islam, bahkan pesantren sudah berkembang sebelum pada zaman kolonial. Muttaqin mengatakan, banyak metode pembelajaran saat itu yang bersifat rutinitas ngaji kitab dan dilaksanakan di langgar-langgar atau surau, didalamnya sang kiai membacakan isi kitab dan santri mendengarkan (bandongan). Dalam model pembejarannya, kiai banyak memberikan tentang ilmu syariat dan tasawuf. Melalui pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan organisasi moderat yang berusaha mendidik para santrinya dengan paham moderat agar menjadi agen-agen muslim moderat di daerahnya masing-masing selepas menuntaskan pendidikannya di Pesantren, oleh karena itu pesantren memiliki beberapa fungsi dan peran, di antaranya adalah fungsi religius (*diniyyah*), fungsi sosial (*ijtima'iyah*) dan fungsi edukasi (*tarbawiyyah*)⁹⁰.

Para kyai selalu menanamkan doktrin untuk menolak Belanda dan berjuang “jihad” membebaskan bangsa Indonesia dari Belanda. Sedangkan menurut Arif Subhan, tentang kapan pesantren mulai muncul sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia, tidak terdapat kesepakatan di kalangan para sarjana.⁹¹ Namun, kiranya pertemuan

⁹⁰ Mujamil Qomar, 2006, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga,) hlm. 23.

⁹¹ Arif Subhan, 2012, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana,.) hlm. 79.

budaya (*cultural encounter*) antara tradisi mendala⁹², desa perdikan⁹³ sebagai tradisi lokal ajaran wakaf⁹⁴, ajaran Islam tentang taalab al-‘ilm dan tradisi pembelajaran Islam yang sudah berlangsung sejak awal perkembangan Islam, merupakan faktor yang mendorong proses pelembagaan (*institutionalized*) pesantren.⁹⁵

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan makalah ini, penulis berusaha menjelaskan mengenai “*Manajemen Pendidikan Pesantren Sebagai Pola Desiminasi Islam Moderat*”. Berdasarkan penelusuran penulis, telah banyak telaah yang membahas tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya terdapat dalam karya buku, *Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed*, Dengan “*Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*”, INIS, Jakarta, 1979, *Zamakhshari Dhofier dengan Tradisi Pesantren; Studi tentang pandangan Kyai*, LP3ES, Jakarta 1982, buku Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Buku Abdurrahman Wahid, dengan *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, buku Abdurrahman Wahid tentang *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam*

⁹² Tempat pertapaan sekaligus pembelajaran bagi calon pendeta pada masa pra-Islam. Lihat Arif Subhan, 2012, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana) hlm 79.

⁹³ Desa *perdikan* merupakan desa yang mendapat perlakuan khusus (*privilege*) dari raja. Desa *Perdikan* memiliki tiga fungsi yaitu memelihara makam tokoh keagamaan, tempat pembelajaran dan masjid. Biasanya penghuni desa *perdikan* adalah pimpinan Islam dan pengikutnya. Lihat Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20....*, 79.

⁹⁴ Wakaf merupakan mekasmisme dalam Islam di mana seseorang, baik penguasa maupun orang biasa yang kaya secara ekonomi, mendermakan harta miliknya untuk kepentingan agama. Lihat Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia....*, 79

⁹⁵ Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20....*, 79

1. Dalam Buku “*Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*” yang ditulis oleh Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed, cetakan pertama pada tahun 1991 ini membahas tentang kajian unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren. Didalam buku ini berusaha merekonstruksi paradigmatik pendidikan pesantren serta mengolah model pendidikan tradisional untuk mereformulasikan jenis dan model kelembagaan pesantren dalam menerima tantangan globalisasi masa ke masa.
2. Dalam Buku “*Zamakhsyari Dhofier dengan Tradisi Pesantren; Studi tentang pandangan Kyai*, yang diterbitkan LP3ES, di Jakarta pada ini tahun 1982 membahas tentang kajian pesantren dengan berbagai perangkatnya, dan salah satunya peran Kiai sebagai tokoh sentral di lembaga manajemen pendidikan pesantren dengan berbagai karakteristiknya.
3. Buku Martin van Bruinessen, *Martin van Bruinessen, 1995, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* yang diterbitkan Mizan di Jakarta, buku ini secara spesifik membahas tentang varian nilai pesantren, diantaranya yaitu kitab kuning yang konon ada sebelum pesantren didirikan, dan membawa pengaruh besar terhadap disiplin keilmuan Islam, buku ini juga menyajikan tarekat-tarekat yang ada di lingkungan pesantren sebagai manifestasi kultur Islam.
4. Selain itu, penulis juga mengambil referensi dari Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* diterbitkan oleh The Wahid Institute di Jakarta tahun 2009, Buku ini menarik sekali menjadi kajian para peneliti terutama membahas tentang

alasan Negara ini didirikan, dimana setelah proklamasi kemerdekaan aliran islam kanan memaksa Indonesia sebagai negara islam, kemudian oleh para pendiri bangsa tidak menghendaaki karena atas dasar multikulturalnya bangsa ini yang menjadikan negara ini berdiri.

5. Dalam Tesis Hermansyah Putra, yang berjudul "*Pondok Pesantren dan Tantangan Globalisasi*" pada tahun 2009, Memotret Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mampu mempertahankan indigeonousnya dalam merawat budaya keislaman salafiyahnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu mentransmisikan pendidikan islam yang semakin berkembang pesatnya arus globalisasi.
6. Dalam jurnal sauqi Futaqi pada tahun 2018 tentang *Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. Membahas tentang moderasi Islam diposisikan sebagai arus utama pendidikan Islam di Indonesia. Pengarusutamaan ini perlu dikembangkan menjadi kajian yang lebih komprehensif untuk melakukan reformasi pendidikan Islam pada semua komponennya. Salah satu komponen yang penting yaitu kurikulum.
7. Dalam Jurnal Asep Abdurrahman pada tahun 2018 tentang "*Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam*", Jurnal ini menyinggung tentang Konsep-konsep seperti wasawirhum fil amri (bermusyawarahlah dalam menyelesaikan suatu perkara) adalah bagian nilai dari *Islam wasathiyah* (islam moderat) Aliran-aliran Islam seperti yang ada di Indonesia dikenal ada NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Hizbut Tahrir (HTI), Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, Lembaga Dakwah

Islam Indonesia (LDII), Gerakan Wahabi, dan lainnya) dan apapun keyakinan agamanya haruslah dihormati dan berusaha sepenuhnya dapat menjalin interaksi yang baik dengan mereka.

8. Dalam Jurnal maimun pada tahun 2017, tentang “*Pola Pendidikan Pesantren Perspektif Pendidikan Karakter*”, Merespon Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, yang menjadikan bangsa ini menghawatirkan, terutama pada kelas generasi muda, maka peranan pesantren menjawab krisis dimensi moral tersebut dengan karakter yang baik dan membentuk kepribadian seseorang yang santun.
9. Dalam Jurnal Taufani taufani, yang membahas tentang “*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, Dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*” pada tahun 2019, yang membahas tentang faham radikalisme berpangkal pada penafsiran yang tekstual dan kaku terhadap kitab suci serta diikuti oleh kepentingan yang sifatnya politis demi perebutan pengaruh, sedangkan tipikal Islam di Indonesia adalah moderat yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bercorak sufistik. Namun belakangan ini, corak moderat perlahan terkontaminasi oleh corak radikal yang berasal dari Timur Tengah.

C. Kerangka Berfikir

konsep manajemen pendidikan pesantren merupakan konsep yang mengembangkan pengelolaan untuk menguatkan sistem didalamnya, sedangkan manajemen pendidikan pesantren terbagi menjadi 2, pertama pesantren salaf (tradisional) yaitu pesantren yang berkonsentrasi pada pendidikan kitab-kitab klasik, yang kedua konsep pesantren modern, yaitu

pesantren yang mencoba mengformulasikan konsep pesantren yang berbasis pendidikan agama pendidikan umum. terlihat dengan beberapa aspek, aspek pertama pada ranah kurikulum yang ditekankan pada dinamika zaman, dimana pesantren tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama saja, melainkan mencoba memberikan kebebasan kepada para santri untuk mengambil konsentrasi sendiri namun penguasaan agama diharuskan. Didalam konsep terminologi pendidikan pesantren sering dikenal dengan kaidah “Menjaga tradisi lama yang baik, dan mengadopsi nilai budaya baru yang lebih baik”

Sedangkan adanya sistem manajemen yang baik dalam pesantren tidak dain dalam rangka untuk membenahi kerangka progam kerja yang dijalankan di pesantren yang meliputi pelaksanaan fungsi- fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) .

Adapun yang menjadi indikator pola desiminasi pendidikan islam moderat diantaranya yang tidak terbantahkan yaitu pesantren, pesantren terbukti menjadi embrio lahirnya pola pendidikan berkarakter di Indonesia, artinya bisa disimpulkan konsep desiminasi pendidikan pesantren yang berhaluan washatiyyah yang diajarkan melalui kitab-kitab klasik (kuning) yang berhasil mengembangkan pendidikan islam moderat yang menjadi solusi ditengah situasi global saat ini. Jadi indikator ini cukup mengatakan bahwa pesantren menjadi lembaga dengan karakteristiknya dapat mengaktualisasikan subtansi ajaran islam secara kaffah.

Pilihan pada Islam moderat (moderasi islam) dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Selama ekstremisme ada di salah satu sisi, dan moderasi beragama tidak hadir, maka intoleransi dan konflik keagamaan tetap akan menjadi “bara dalam sekam”, yang setiap saat bisa melesak, apalagi jika disulut dengan sumbu politik.

